

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Tanzeh, 2011, Metodologi Penelitian Praktis, Cet. I, Yogyakarta Teras.
- Boedi Harsono, 2007, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentuk Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Jakarta: Djambatan.
- Budi Untung, 2015, 22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, Metode Penelitian, Media Press, Semarang.
- Dr. B.F. Sihombing, 2019, Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaina B, 2018, Metode Penelitian Hukum, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2009, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung.
- Hari Sasangka, 2005, Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata, Mandar Maju, Bandung.
- Herlien Budiono, 2018, Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Akta Notaris di Dalam Praktik, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Yamin Lubis, 2003, Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Mulyoto, 2012, Perjanjian; Tehnik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai, Edisi Revisi, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Pernanda Group, Jakarta.
- R. Subekti, 2005, Hukum Pembuktian, Pt. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Rianto Adi, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Penerbit Granit, Jakarta.
- Salim HS, 2019, Peraturan Jabatan dan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pt. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, liberty, Yogyakarta.

Suparman Marzuki, 2017, Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, FH UII Press, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

C. Sumber Lain

Addien Iftitah, 2014, 'Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah', Lex Privatum, Volume.II, Nomor 3 Agustus – Oktober 2014

Dpcpermahijogja.wordpress.com, 2011, Tugas dan Wewenang Notaris-PPAT, Jogjakarta, 25 Desember 2011, <https://dpcpermahijogja.wordpress.com/2011/12/25/tugas-dan-wewenang-notaris-ppat/>

Eka febriyana, 2021, 'Tanggung Jawab PPAT Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli Yang Tidak Transparan Dan Akuntabel Di Kabupaten Seleman', Program Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Ermasyanti, 2012, "Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Proses Jual Beli Tanah", Keadilan Progresif, Volume III, Nomor 1

Gusti Bagus Yoga Prawira, 2016, 'Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah', Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Volume IV, Nomor 1, April 2016.

Masnah Sari, 7 September 2002, "Kewajiban PPAT Untuk Merahasiakan Isi Akta-akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Yang Diberikan Oleh Undang-undang Guna Melindungi Kepentingan Masyarakat Umum", Makalah disampaikan pada pembekalan PPAT dalam menghadapi perkara-perkara pidana, perdata yang berkaitan dengan rahasia jabatan, Depok.

Richard Cisanto Palit, 2015, "Kekuatan Akta Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan, Lex Privatum, Volume III, Nomor 2, April-Juni 2015

Suci Ananda Badu, 2017, Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Indonesia, Lex Administratum, Volume V, Nom